

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM
MENCARI KEADILAN**

TESIS

Oleh

**YETTI OCTAVIANINGSIH
(2402198023)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM
MENCARI KEADILAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**YETTI OCTAVIANINGSIH
(2402198023)**





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeti Octavinningsih

NIM : 2402198023

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"ANALISIS "YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM Mencari Keadilan"**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakni untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.



Jakarta, 3 Februari 2026

Yeti Octavinningsih
NIM: 2402198023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI
ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN DALAM MENCARI KEADILAN**

Oleh:

Nama : Yetti Octavianingsih
NIM : 2402198023
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

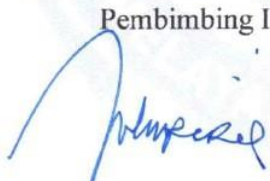
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. John Pieries, S.H., M.H.

NIP/NIDK: 851211 / 318084902

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIP/NUPTK: 191632/5434757658137093



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

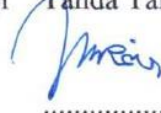
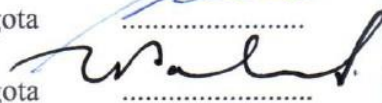
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yetti Octavianingsih
NIM : 2402198023
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MENCARI KEADILAN.”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. John Pieries, S.H., M.H	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Marudut Parulian Silitonga. S.Th., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 3 Februari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yeti Octavianingsih
NIM : 2402198023
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM Mencari Keadilan**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.



Jakarta, 3 Februari 2026

Yeti Octavianingsih
Yeti Octavianingsih
NIM: 2402198023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mencari Keadilan.” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, sekaligus sebagai kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika kebijakan anggaran dalam program bantuan hukum.

Tesis ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama mengenai bagaimana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpengaruh terhadap ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya dalam konteks pemenuhan hak konstitusional untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini meninjau aspek yuridis dari kebijakan efisiensi tersebut dan mengkaji apakah implementasinya telah sejalan dengan prinsip negara tentang Bantuan Hukum.

Melalui rangkaian penelitian, penulis menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas fiskal, pada praktiknya menimbulkan hambatan struktural bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan bagi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan efektivitas anggaran dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga menimbulkan risiko terlanggarnya hak

masyarakat miskin untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak. Di sisi lain, terdapat pula upaya positif pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan program melalui mekanisme akuntabilitas dan penyesuaian anggaran tahunan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. John Pieries, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 dan Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. St. David Maruhum Lumbantobing, Ketua Yayasan Universitas Kristen
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI);
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI);
4. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI);
5. Prof. Dr. John Pieries, S.H., M.H. dan Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Proposal, yang telah memberikan masukan

yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini;

6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Suami tercinta Rangga Agung Prabowo (terimakasih sayang selalu mensupport, mendukung dan membantu mencari ide-ide apa yang ingin dicurahkan dan ditulis di dalam tesis ini), Anak-Anakku tersayang Nayendra Aqeela Khalfani dan Nayazka Azzamir Kafie (terimakasih sayang yang selalu menjadi sumber energi, cinta dan kekuatan mami). Untuk ke empat orang tuaku Ayah, Ibu, Mama dan Papa yang selalu memanjatkan dan mencurahkan doa-doa tulus penuh kebaikan dan kehangatan. Terkhusus Almarhum Ayahku, ini kado untuk Ayah, impian Ayah untuk melihat Yetti menggapai pendidikan yang lebih tinggi telah terwujud, semoga Ayah senantiasa tersenyum bahagia melihat anakmu dari kejauhan, salam rindu dan cinta selalu untuk Ayah.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademisi serta praktisi yang konsern dengan isu-isu terkait keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program bantuan hukum.

Jakarta, 3 Februari 2026

Penulis

Yetti Octavianingsih
(2402198023)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR DIAGRAM	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	20
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	21
F. Metode Penelitian	45
G. Orisinalitas Penelitian.....	50
BAB II.....	52
A. Bantuan Hukum	52
1. Prinsip Pemberian Bantuan Hukum.....	59
2. Peran Kementerian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan	66
3. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum.....	70
4. Lembaga Bantuan Hukum (Pemberi Bantuan Hukum)	77
5. Anggaran Program Bantuan Hukum.....	86
B. Teori Keadilan	93
C. Teori Kepastian Hukum.....	101
D. Efisiensi Anggaran.....	109
E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).....	118

F. Disiplin Anggaran.....	127
BAB III	130
A. Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum	131
B. Dampak Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum	145
BAB IV	163
A. Asas-Asas Program Bantuan Hukum	163
B. Kebijakan Pemerintah.....	171
BAB V.....	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran	182
DAFTAR PUSTAKA.....	185



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Data Komposisi Alokasi Anggaran Program Bantuan Hukum di Kanwil

Kementerian Hukum..... 17



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Judul Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 2. 1. Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum.....	85
Tabel 2. 2. Rincian Anggaran Program Bantuan Hukum.....	93
Tabel 3. 1. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.....	136
Tabel 3. 2. Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2025	143
Tabel 3. 3. Data Rincian Kriminal di Indonesia	155
Tabel 3. 4. Jumlah Jenis Bantuan dan Jenis Kasus Kriminal Tahun 2022-2024	157
Tabel 4. 1. Besaran Anggaran Bantuan Hukum di Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2022 – 2024	169



ABSTRAK

Judul Tesis: Analisis Yuridis Kebijakan Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mencari Keadilan

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Dampak Efisiensi Anggaran, Kebijakan Pemerintah

Kerangka normatif yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan posisi negara sebagai penjamin akses keadilan, khususnya bagi kelompok yang berada dalam keterbatasan ekonomi. Regulasi ini tidak sekadar menghadirkan mekanisme bantuan hukum, tetapi memuat dimensi konstitusional yang menuntut adanya perlindungan hak secara setara di hadapan hukum. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara menjadi prasyarat substantif untuk menjembatani ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kelompok miskin dalam mengakses sistem peradilan. Tanpa intervensi yang memadai, prinsip persamaan di hadapan hukum berisiko berhenti pada tataran normatif dan tidak menjelma sebagai realitas sosial.

Namun demikian, jaminan normatif tersebut menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Rasionalisasi belanja negara yang berdampak pada program bantuan hukum justru memunculkan paradoks kebijakan. Di satu sisi, negara mengafirmasi komitmennya terhadap akses keadilan, tetapi di sisi lain membatasi instrumen yang menjadi sarana utama pemenuhannya. Keterbatasan alokasi anggaran tidak hanya mengurangi jangkauan layanan, melainkan turut memengaruhi kualitas pendampingan hukum yang diterima oleh masyarakat miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi dalam implementasi kebijakan publik.

Pendekatan penelitian yang digunakan menempatkan persoalan ini dalam kerangka analisis hukum normatif dengan menitikberatkan pada konstruksi peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan. Melalui analisis kualitatif, berbagai norma, teori, serta pandangan doktrinal dihimpun untuk mengurai ketegangan antara desain hukum dan praktik kebijakan. Metode ini memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas implementatif yang berkembang di lapangan.

Temuan penelitian mengindikasikan adanya kontradiksi mendasar antara kebijakan efisiensi anggaran dan prinsip negara hukum. Pengurangan dukungan terhadap program bantuan hukum mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap kelompok rentan, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan. Dampak lanjutannya tidak hanya terlihat pada meningkatnya kerentanan kriminalisasi terhadap masyarakat miskin, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian agenda pembangunan nasional, termasuk target prioritas yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu fondasi utama.

Situasi tersebut menuntut adanya respons kebijakan yang lebih progresif dan adaptif. Negara perlu merumuskan strategi yang tidak semata berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan distributif. Inovasi dalam pengelolaan program bantuan hukum menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan layanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya dipertahankan sebagai norma, tetapi diwujudkan secara konkret dalam praktik penyelenggaraan hukum yang menjangkau seluruh warga negara tanpa pengecualian.



ABSTRACT

Thesis Title: Legal Analysis of Budget Efficiency Policy of Legal Aid Program for Poor Communities in Seeking Justice

Keywords: Legal Aid, Law Number 16 of 2011, Impact of Budget Efficiency, Government Policy

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid regulates legal aid for the poor as a way for the state to ensure that the impoverished have access to justice and as a guarantee of state protection of everyone's constitutional right to be recognized, protected, and given fair legal certainty. Without official involvement, it will be very difficult for excluded or disadvantaged groups to comprehend what equality under the law entails. The Legal help Law would provide legal help to everyone who can prove they are impoverished. Although the law guarantees access to justice and legal certainty, financial efficiency initiatives have an impact on the legal aid budget, which is expressly designed to help the impoverished deal with legal proceedings. The quality and amount of legal help given to the impoverished in their pursuit of justice will be directly impacted by the budget's limitations, which will also lead to new issues. Therefore, in order to solve the issues brought on by budget efficiency in legal aid programs, government measures are required.

Normative legal research using a statutory approach is the research methodology. Techniques for acquiring data employ a library approach. Data analysis employs a qualitative normative technique that explains the facts and circumstances surrounding the study topic and assesses them using a range of laws, theories, doctrines, or expert opinions in order to find answers to the issues being discussed.

The research findings reveal a fundamental tension between the policy of budget efficiency in legal aid and the principles of the rule of law, which require the state to guarantee equal access to justice for all citizens. Budget rationalization in legal aid programs cannot be viewed merely as a technical fiscal matter; rather, it reflects the extent of the state's commitment to ensuring equality before the law. When such allocations are reduced, the consequences extend beyond limited service provision, contributing to increased vulnerability of the poor to criminalization and widening disparities in legal access between different social groups.

In a broader context, this condition has implications for the disruption of national development priorities, including targets outlined in the government's strategic policy framework for 2025. Unequal access to justice risks weakening the legitimacy of the legal system in the eyes of the public, as law is no longer perceived as an equitable instrument of protection but instead as a mechanism that reproduces inequality. Over time, this situation may lead to a decline in public trust and create conditions that potentially undermine the principle of social justice as a foundational element of state governance.

Therefore, the reform of legal aid policy must be positioned as a strategic priority. The state is required to develop more adaptive and inclusive approaches

that are responsive to evolving social dynamics and the actual needs of the community. Innovation in the design of legal aid policies and programs should focus on expanding service coverage, improving the quality of legal assistance, and strengthening mechanisms that ensure equal access to the justice system. In this way, justice is not confined to an abstract normative ideal but is realized concretely in the practice of governance.

Keywords: Legal Aid, Law Number 16 of 2011, Impact of Budget Efficiency, Government Policy

